

ABSTRAK

Kejahatan narkoba di Indonesia berada pada tingkat yang membahayakan, karena disamping merusak fisik dan mental juga mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat, berpotensi menjadi menghambat pembangunan sosial yang berasppek materiel spiritual yang pada gilirannya dapat mengganggu sendi-sendi keamanan nasional dalam rangka pembangunan nasional menuju masyarakat yang adil dan makmur seperti yang dicita-citakan dan tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat.

Salah satu usaha rasional yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan narkoba adalah dengan pendekatan kebijakan hukum pidana. Permasalahan yang dihadapi yaitu bagaimana kebijakan sanksi pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkoba di Indonesia saat ini, apakah kelemahan dalam kebijakan sanksi pidana dalam rangka penanggulangan tindak pidana narkoba di Indonesia, dan bagaimanakah kebijakan sanksi pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkoba di Indonesia pada masa yang akan datang.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan analisis data secara kualitatif. Dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai sanksi pidana. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian terhadap data sekunder.

Pengaturan tentang kejahatan narkoba telah diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Namun kebijakan sanksi pidana dalam rangka menanggulangi tindak pidana narkoba di Indonesia. Mempunyai beberapa kelemahan yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana denda untuk korporasi, dan tindakan rehabilitasi untuk pecandu narkoba masih memiliki celah bagi pelaku tindak pidana narkoba. kebijakan sanksi pidana narkoba kedepan harus mampu dalam menanggulangi tindak pidana narkoba serta tetap memberi perlindungan terhadap korban penyalahgunaan narkoba. Sehingga terciptanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Kata Kunci : kebijakan sanksi pidana narkoba, penanggulangan, tindak pidana narkoba.

ABSTRACT

Narcotics crime in Indonesia has elevated into a higher risk, since it may result in collateral damage despite its negative effect on physical and mental health the its crime also creates social damage, so that it has a great potential to hamper national development, either materially or spiritually. Such problem, in turn, distracts national defense in sues so that the national development does not occur in line with national plan stipulated within the fourth paragraph of the UUD 1945 as the supreme national constitution.

One of rational efforts used for overcoming drugs crime is a criminal law policy approach. Problem faced is how is the current criminal sanction policy used to overcome narcotic crime in Indonesia, what are weakness in the current criminal sanction policy used to overcome narcotic crime in Indonesia, and how the policy used to overcome narcotic crime in Indonesia will be in the future.

This study applied a normative jurisdiction method, in which secondary data were subject to an analysis which came from primary, secondary, and tertiary law materials, and analysis qualitative data. To understand the law as a set of rules or positive norm in the regulatory system that governs the criminal sanctions. Therefore, this study was that of library research, in which secondary data became the major sources.

Narcotics regulation has been regulated in Undang-Undang No. 35 of 2009 on Narkotika. but the criminal sanctions policy used to overcome narcotics crime in Indonesia. has several drawbacks, namely the death penalty, imprisonment, criminal penalty for corporations and rehabilitation measures for drug addicts still have a gap for the doers. narcotics criminal sanctions policy will be in the future must be able to cope with the narcotic crime and still provide protection for victims of drug abuse. thus creating fairness, certainty and legal expediency.

Keywords : narcotics criminal sanctions policy, countermeasures, narcotic crime.